◀ Redaksi ▶

Mata Banua
Media Informasi Masyarakat

■ **Penerbit :**
PT Cahaya Media Utama, Banjarmasin

■ **Telah Terverifikasi Administrasi & Faktual**
oleh Dewan Pers
No 552/DP-Verifikasi/K/VI/2020

■ **Terbit Pertama Kali :**
10 Juli 2006

■ **Pemimpin Umum :**
H Fachruddin Nor Ifansyah

■ **Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab:**
Zainal Helmie

■ **Penasehat Hukum :**
Dr. H Fauzan Ramon, SH, MH

■ **Koordinator Peliputan :**
Khaidir Rahman

■ **Manager Produksi :**
Mahmud M Siregar

■ **Asisten Manager Produksi :**
Rizky Yosfia Ruswita

■ **Redaktur :**
HA Fadillah, Suriani, Rudi Setiawan

■ **Staf Redaksi :**
Bambang Santoso, Iin Silvia, Samsu Rizal, Dwiki Hamza Nugraha

■ **Biro-Biro/Perwakilan :**
Rizal Fachrani (**Jakarta**), Herman Hidayat (**Tapin**), Muhammad Yusuf (**Hulu Sungai Utara**), Rasyid Ridho (**Banjarbaru & Kabupatan Banjar**), (**Balangan**) Sugianor, Ebet Hadiani (**Kotabaru**) Risma (**Tanah Laut**), Akhmad Alfianor (**Tanah Bumbu**)

■ **Lay Out :**
Akhmad Riza, Ronny Friandy, Amril Sofyan, Taufiqqurahman

■ **Produksi Iklan / IT Web :**
Pahliawan Patria
Ibnu Zulkarnain
Wendy Maiyossi Fahril

■ **Pemimpin Perusahaan :**
H Fachruddin Nor Ifansyah

■ **Sekretaris Perusahaan :**
Gusti Nur Ilma Ariella

■ **Sekretaris Redaksi :**
Pratiwi

■ **Manager Iklan dan Keuangan :**
Hj Noor Diana

■ **Alamat Redaksi/Bisnis/Sirkulasi :**
Jl Pekapuran Raya Rt 32 No 87
Jl Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin 70234

■ **e-Mail :** redaksi_matabanua@yahoo.com

■ **e-Mail Iklan :** iklan.matabanua@yahoo.com

■ **Harga Langganan :** Rp 75.000/bulan dalam kota

■ **Percetakan :**
PT Grafika Wangi Kalimantan
Isi Diluar Tanggung-jawab Percetakan

■ **Tarif Iklan :**
DISPLAY UMUM :
Hitam Putih (BW) : Rp 8.000/mmk
Spot Colour (SC) : Rp 10.000/mmk
Full Colour (FC) : Rp 15.000/mmk

DISPLAY HALAMAN MUKA :
Hitam Putih (BW) : Rp 13.000/mmk
Spot Colour (SC) : Rp 15.000/mmk
Full Colour (FC) : Rp 24.000/mmk

DISPLAY HALAMAN BELAKANG:
Hitam Putih (BW) : Rp 10.000/mmk
Spot Colour (SC) : Rp 13.000/mmk
Full Colour (FC) : Rp 22.000/mmk

IKLAN KOLOM : Rp 8.000/ mmk
IKLAN KELUARGA/ DUKA CITA : Rp 5.000/ mmk
IKLAN BARIS : Rp 5.000/ mmk

■ **Catatan:**
Harga belum termasuk PPN 10%
Pembayaran dimuka

TELEPON PENTING	
Polda Kalsel	3368571
Poltabes Banjarmasin	3251411
Polsek Banjar Tengah	3353003
Polsek Banjar Barat	4412952
Polsek Banjar Timur	3252473
Polsek Banjar Selatan	3261244
Polsek Banjar Utara	3300463
KPPP Poltabes Banjarmasin	3368305
Polres Banjar	4721110
Polresta Banjarbaru	2772266
RSUD Ulin	3257472
RS Ansyari Saleh	3300741
RS Suaka Insan	3352225
RS Islam	3354896
RS DR Soeharsono	3368422
RS Siaga	3253111
RS Sari Mulia	3252570
RSUD Banjarbaru	4772380
PMK Hippindo	7500911
Rescue 911	9110911

REDAKSI menerima sumbangan tulisan opini, artikel maupun surat pembaca lainnya. Panjang tulisan opini/ artikel maksimal 3 (tiga) halaman kuarto, diketik dua spasi. Sedangkan surat pembaca maksimal 1 (satu) halaman kuarto.Semua isi tulisan opini dan artikel bukan mencerminkan sikap redaksi dan merupakan tanggung jawab penulisnya. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah esensi yang ada. Semua tulisan harus dilengkapi dengan identitas diri yang masih berlaku, dikirim Alamat Redaksi/ Bisnis/ Sirkulasi:Jl Pekapuran Raya Rt 32 No 87 Jl Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin 70234

oleh:
Nuruddin Zain
ASN Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin

SEHARUSNYA petani memperoleh upah yang layak. Itu karena mereka pahlawan pangan. Predikat yang sangat wajar bila disematkan ke petani, karena merekalah yang menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan predikat pahlawan pangan ini, balas jasa mereka harusnya sama atau malah lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Tapi kenyataannya tidak demikian. Upah petani masih rendah. Kenyataannya tidak seindah harapan. Faktanya di Kalimantan Selatan, upah riil yang diterima oleh mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai pertanian lebih rendah dari UMP-nya. Hal ini dapat dilihat pada publikasi “Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2021” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selengkap-nya bisa diakses pada tautan bps.go.id.

Berdasarkan rilis tersebut, pada Agustus 2021, upah riil pekerja di sektor pertanian di Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp 2.455.950. Dibandingkan dengan UMP pada tahun 2021 yang sebesar Rp 2.877.449, maka upah riil ini lebih rendah Rp 421.499. Lebih rendah hampir 15 persennya. Nilai yang tidak sedikit, apalagi di tengah pandemi Covid19 dan banjir yang melanda hampir sebagian besar wilayah sentra pertanian di Kalimantan Selatan, seperti Banjar dan Hulu Sungai Tengah.

Kondisi yang sama juga terjadi pada waktu sebelumnya, di mana upah riilnya

oleh:
AI Muslimah Prihatin, S.Pd
(Pendidik)

KDRT yang terus meningkat di Provinsi Kalimantan Selatan mendapat sorotan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel saat kunjungan kerja ke Tabalong. Meningkatnya KDRT bahkan menjadi tren umum nasional dan global. Bahkan tren ini dinilai sebagai fenomena gunung es karena diyakini banyak yang belum berani lapor.

Tidak berubah dari dulu, solusi yang ditawarkan tidak jauh dari meratifikasi agenda global ala feminis dan kesetaraan gender, misalnya mendorong segera disahkannya RUU PKS yang jauh dari solutif, bahkan hanya akan menyebabkan dan menyisakan permasalahan-permasalahan baru. Sebagaimana terjadi di negara-negara “maju” yang sudah lama menerapkan hukum positif terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Akan tetapi kekerasan tersebut tidak hilang justru terus bertambah. Yang berbeda hanyalah meningkatnya perempuan yang melapor akan tetapi kasusnya tidak bisa dituntaskan dan tetap eksis. Akar masalah terjadinya KDRT yang

oleh:
Nanang Qosim, M.Pd
Dosen Poltekkes Kemenkes Semarang

PENGALAMAN pembangunan di negara-negara yang sudah maju, membuktikan betapa besar peran pendidikan dalam proses pembangunan. Secara umum telah diakui bahwa pendidikan merupakan penggerak utama (prime mover) bagi pembangunan. Secara fisik pendidikan di negara maju telah berhasil memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari segala strata dan segala bidang yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan.

Negara-negara berkembang memandang pembangunan yang telah terjadi di negara maju seakan-akan merupakan cermin bagi diri mereka. Maka, pendidikan modern ala negara maju Barat pun diimpor

Upah Petani (Selalu) Lebih Rendah dari UMP

lebih rendah dari UMP-nya. Pada Agustus 2020, upah riil petani adalah sebesar Rp 2.483.617, dan UMP-nya sebesar Rp 2.877.449. Kemudian, pada Agustus 2019, upah riil petani adalah sebesar Rp 2.589.717, dan UMP-nya sebesar Rp 2.651.782.

Dengan kondisi yang terjadi pada rentang 2019-2021 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa upah riil petani hampir selalu lebih rendah dari UMP-nya. Kondisi balas jasa yang kurang pas rasanya bagi mereka yang dapat dikatakan sangat berjasa, yakni menjamin kecukupan pangan kita.

Timbul pertanyaan, kenapa setelah sekian lama kondisi itu tidak ada perubahan? Rentang waktu 76 tahun kita merdeka rasanya sudah cukup untuk memberikan kesempatan, agar upah petani juga bisa sejajar dengan lapangan kerja lainnya, yakni minimal sama dengan UMP-nya. Ada apa gerangan yang menjadi akar penyebab masalahnya?

Kemungkinan permasalahan pertama adalah rendahnya produktivitas. Terlihat dari kondisi berikut: sektor pertanian merupakan penyerap lapangan kerja terbesar. Namun, belum menjadi nomor satu pada share perekonomian Kalimantan Selatan.

Share pertanian di Kalimantan Selatan pada triwulan III 2021 adalah sebesar 16,20 persen, masih kalah dari sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan share 19,54 persen (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan III 2021). Kemudian, dalam penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian menyerap sebesar 31,87 persen, sangat jauh lebih tinggi dari sektor pertambangan dan penggalian yang hanya menyerap sebesar 3,33 persen pekerja (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2021).

Produktivitas pertanian yang masih rendah juga terlihat dari masih banyaknya petani gurem, yakni petani dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha. Pada tahun 2018, dari sebanyak 472.607 rumah tangga usaha pertanian di Kalimantan Selatan, ada sebanyak 182.408 (38,64 persen) petani gurem (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 Provinsi Kalimantan Selatan Seri-A2).

Belum lagi hambatan yang menghadang, seperti: pupuk yang kadang tidak ada, atau serangan hama, juga faktor alam - seperti banjir yang bisa dengan sekejap menghilangkan hasil di depan mata.

ilustrasi

Kondisi tersebut kemungkinan besar menggerus pendapatan petani, sehingga tidak bisa terlalu besar memberikan imbal balas jasa kepada pekerja yang terlibat di sektor pertanian. Pekerja di pertanian terpaksa menerima tawaran upah yang lebih rendah, karena nilai tawar mereka yang juga rendah akibat permasalahan kedua berikut, yakni tingkat pendidikan yang rendah.

Kemungkinan permasalahan kedua di sektor pertanian, seperti disebutkan sebelumnya adalah tingkat pendidikan yang rendah. Pada tahun 2020, hampir dua per tiga pekerja pertanian di Kalimantan Selatan hanya berpendidikan tamat SD ke bawah (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2020). Kondisi ini kemungkinan mengindikasikan pekerjaan pertanian yang ada di Kalimantan Selatan adalah pekerjaan yang belum membutuhkan skill yang tinggi. Kemungkinan hanya membutuhkan pekerja yang mengandalkan kemampuan tenaga semata. Tingkat pendidikan biasanya berhubungan dengan nilai balas jasa yang diberikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka biasanya semakin besar pula balas jasa yang didapatkan.

Kemungkinan permasalahan ketiga, yakni jam kerja yang tidak maksimal. Berdasarkan rilis BPS, pada Agustus 2021, rata-rata jam kerja pekerja di sektor pertanian di Kalimantan Selatan adalah 38 jam per minggunya. Kurang dari rata-rata jam kerja produktif yang biasanya 40 jam seminggu. Kurangnya jam kerja ini kembali lagi terkait dengan minimnya lahan pertanian yang dikuasai.

Kemungkinan permasalahan keempat, yaitu kepastian harga jual produk pertanian. Selama ini petani menjual produknya secara offline. Padahal, bila

bisa diupayakan secara online maka bisa langsung menjangkau konsumen akhir, sehingga bisa mendapatkan harga terbaik. Meskipun ini tidak mudah, karena hanya 7,5 persen saja dari seluruh pekerja di pertanian yang menggunakan internet untuk menunjang pekerjaan mereka sehari-hari (data diolah dari hasil Sakernas Agustus 2020).

Di samping itu, harga produk pertanian yang labil masih saja terjadi. Produknya seperti padi memang dipanen pada waktu yang bersamaan sehingga berisiko menambah jumlah penawaran. Namun, ada keunggulannya, yakni bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Keunggulan seperti ini semestinya bisa untuk menjaga kestabilan harganya. Sistem resi gudang -yang bisa digunakan supaya hasil panen bisa dijual di saat harga yang tinggi- seperti di Barito Kuala juga bisa dikembangkan di wilayah lain.

Impor beras yang waktunya tidak pas, seperti saat panen padi juga perlu diatasi. Agar harga panennya tidak menjadi anjlok. Perlu koordinasi lagi mengenai data yang menyatakan stok tidak aman, sehingga perlu dilakukan impor justru saat terjadi panen.

Keempat permasalahan tersebutlah yang mungkin menjadi penghambat utama, besaran upah petani yang tidak sepadan dengan jasanya. Sebelum terlambat maka harus dilakukan effort yang lebih kuat lagi untuk dapat menyelesaikannya.

Pada akhirnya, perlu komitmen dan sinergi dari kita semua. Agar upah para pahlawan pangan ini bisa sejajar atau melebihi UMP. Jangan sampai upah yang rendah ini menjadi penyebab turunnya minat bekerja di sektor pertanian. Kalau itu terjadi maka dampak buruknya bisa mengancam kecukupan pangan kita. Semoga tidak.

Muluskan RUU PKS KDRT Menjadi Perhatian

bersifat preventif justru tidak disorot, wajar jika kasusnya terus meningkat.

Memang benar, peningkatan kekerasan terhadap perempuan, terus terjadi, bahkan dengan jenis kekerasan yang makin beragam dan makin memprihatinkan. Namun sejatinya penyebabnya bukan karena belum disahkannya RUU PKS. Kehidupan sekuler dan kapitalismelah yang menyebabkan semua kejahatan itu terjadi. Masyarakat yang dibesarkan dalam ideologi tersebut, biasa menafikan peran agama sehingga menjadikan individu tega melakukan kejahatan terhadap sesama, bahkan terhadap keluarganya sendiri.

Tanpa agama dalam konteks way of life, manusia bisa menjadi lebih kejam dari binatang, bebas berbuat apa saja sekehendak hatinya dengan dalih HAM. Faktor penyebab terjadinya KDRT, seperti permasalahan ekonomi keluarga akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme malah tak tersentuh. Tiadanya pemahaman sikap yang benar dalam berperilaku dan memul:ikan pasangan karena pendidikan berbasis sekuler juga luput dari perhatian.

Malah digembar-gemborkan solusi kesetaran gender sebagai solusinya. Solusi yang berbasis ide kebebasan ala sekularisme. “Masalahnya apa solusinya kemana” sangat menggambarkan situasi saat ini, gak nyambung.

RUU PKS akan bernasib sama dengan pendahulunya yang sejenis yang sudah lebih lama diterapkan di negara-negara “maju”. Justru kebebasan berperilaku yang sebenarnya akan dilindungi RUU PKS, sebagai manuver politik kebijakan yang dipandang oleh barat masih belum mencapai level yang diharapkan di negeri-negeri muslim, khususnya perilaku seksual. Kebebasan seksual ini selaras dengan jaminan atas hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) atau Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR).

Dikuatkan dengan Deklarasi IPPF (International Planned Parenthood Federation) tentang Hak seksual pada tahun 2008. Semua ini diaruskan ke negeri-negeri muslim, termasuk Indonesia. Semua agenda global inilah yang mendasari terus kuatnya desakan pengesahan UU PKS, karena akan menjadi payung hukum tegaknya HKSR, yang menjadi asas kebebasan seksual. Pengesahan RUU PKS jelas membahayakan umat Islam karena perbuatan yang melanggar aturan Allah, seperti perzinahan, aborsi, dan lainnya akan dianggap legal selama dilakukan atas keinginan sendiri. Pengesahan RUU P-KS akan menjadi salah satu jalan menjadikan generasi muslim hidup bebas jauh dari syariat. Karena itu, alih-alih melindungi perempuan dari KDRT, pengesahan RUU

PKS justru merusak perempuan dan harkat martabat kemanusiaan, serta menjauhkan umat dari syariat Allah. RUU PKS bukan hanya layak ditunda, namun justru harus dicampakkan. Wallahuallam

Sebagai pengantinyanya, adalah penerapan aturan Allah Zat Yang Maha Sempurna. Penerapan aturan Islam secara kaffah akan mampu membasmi secara tuntas kekerasan terhadap perempuan. Islam mewajibkan negara untuk menjaga keamanan rakyatnya agar senantiasa menyadari adanya hari akhirat. Negara akan menjauhkan berbagai hal yang dapat menyedatkan syahwat pada jalan kehinaan. Selain itu, Islam juga memiliki sistem pendidikan yang mampu melahirkan individu beriman dan bertakwa.

Islam juga memiliki sistem pergaulan yang menjaga interaksi laki-laki dan perempuan serta menetapkan pemisahan keduanya bila tidak ada kebutuhan yang sesuai dengan syariat. Islam juga memiliki sistem sanksi yang mampu mencegah terjadinya kejahatan sekaligus membuat jera para pelakunya.

Penerapan semua sistem kehidupan berdasarkan aturan Islam itu akan menjadi cara efektif untuk menghapuskan semua bentuk kekerasan, baik yang menasars perempuan maupun laki-laki. Semua itu dapat diwujudkan bila tegak Khilafah Islamiyah. Wallahu'alam.

Tantangan Guru dan Pendidikan

ke negara-negara sedang berkembang. Biaya dan tenaga diarahkan untuk mengembangkan pendidikan. Anggaran belanja di sektor pendidikan terus meningkat. Usaha mendatangkan tenaga ahli dan mengirim tenaga domestik ke negara maju mendapatkan prioritas yang tinggi. Hasil angka buta huruf menurun secara drastis, gross atau net enrollment ratio naik, education achievement penduduk semakin tinggi.

Namun, di balik keberhasilan menaikkan pendidikan di kalangan masyarakat, pada 1970-1980-an, para ahli mulai melihat tanda-tanda “lampu-kuning” pada sistem pendidikan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini menimbulkan problema: meninggalkan generasi muda dengan pendidikan tetapi tanpa pekerjaan dan memberikan tekanan yang berat pada anggaran belanja.

Hal ini disebabkan oleh perkembangan di luar pendidikan, khususnya di dunia ekonomi dan teknologi, apalagi di masa pandemi Covid-19 yang berlangsung cepat sehingga perkembangan sektor pendidikan tertinggal di belakang. Akibatnya, pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai pendorong proses kemajuan, melainkan menjadi “pengikut proses kemajuan atau keadaan”.

Persoalan-persoalan pendidikan dan pembangunan yang terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, secara mendasar berbeda dengan problema yang ada di negara-negara maju. Teori-teori Barat tentang pendidikan dan pembangunan tidak senantiasanya bersifat universal. Jiwa dan watak bangsa harus menjiwai sistem pendidikan itu sendiri.

Semenjak Orde Baru, khususnya mulai Pelita I, perkembangan sektor pendidikan di Indonesia berkembang dengan pesat. Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi pada perkembangan sektor pendidikan didasarkan pada asumsi bahwa dengan pendidikanlah, pembangunan ekonomi Indonesia akan berhasil dengan baik.

Namun, dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi problema berat, meliputi problem internal in-efficiency, external in-efficiency, dan ketidakmerataan kesempatan pendidikan. Internal in-efficiency dalam sektor pendidikan berbentuk tingginya angka drop-out dan repeaters (ulang kelas yang sama). External in-efficiency berujud lulusan pendidikan tidak dapat diserap oleh pasar tenaga kerja ataupun dapat dipakai tetapi antara pekerjaan yang dilakukan berbeda dengan pendidikan yang diperoleh.

Pembaharuan pendidikan sering tidak dapat dipraktikkan karena keterbatasan pengetahuan pada tingkat pelaksana. Tidak jarang suatu pembaharuan pendidikan mengakibatkan perbedaan semakin tajam antara pendidikan di urban dan di rural. Hal ini bisa dimaklumi, sebab guru-guru di kota lebih siap untuk menerima pembaharuan yang dilaksanakan. Di samping itu, di banyak hal, pembaharuan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia tidak mempunyai strategi monitoring dan prosedur evaluasi yang mantap.

Guru harus mempunyai pengetahuan yang relatif luas. Pada diri murid sudah terpatriti kecintaan dan kesadaran pada hakikat ilmu, sikap ingin tahu, menghargai pikiran-pikiran dan bukti-bukti kebenaran,

objektif dan bersifat toleransi. Patut kita pertanyakan, sudahkah syarat-syarat tersebut ada pada kelas-kelas dan siswa-siswa di tanah air kita?

Apa yang diketemukan di kelas-kelas di Indonesia jauh dari yang diperlukan. Kelas-kelas masih sangat kaku dan formal. Pengetahuan para guru relatif terbatas. Oleh karena itu, mereka tidak berani membicarakan apa yang di luar silabi karena membicarakan di luar silabi memang di luar kemampuannya. Di pihak lain, murid cenderung mendengarkan, menerima dan mencatat apa yang diterangkan oleh guru. Apa yang diterangkan oleh guru sudah dianggap merupakan kebenaran, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan dan diuji lagi.

Dalam setiap pembaharuan pendidikan, guru memegang peran strategis. Sebab, merekalah yang merupakan pelaksana pembaharuan pada level kelas. Namun, pengalaman di Indonesia menunjukkan guru lebih banyak dilihat sebagai objek dalam pembaharuan pendidikan. Sehingga, setiap kebijakan lebih banyak bersifat instruksi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dan tidak ada ruang bagi guru untuk berimprovisasi.

Perencanaan dan kebijakan nasional memang perlu. Namun, pelaksanaan pembaharuan pendidikan sangat tergantung pada semangat, rasa keterlibatan, dan kesadaran para guru. Guru akan memberikan respon positif pada setiap usaha pembaharuan yang dapat meningkatkan kemampuan profesional mereka dan memberikan ruang bagi mereka untuk berimprovisasi secara aktif dalam proses pembaharuan.